

The Effect of E-Procurement Implementation, Internal Control System and Human Resources Competence on The Quality of Goods and Services Procurement: A Case Study of The Goods and Services Procurement Bureau of The NTT Province Regional Secretary in 2025

Pengaruh Implementasi E-Procurement, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sdm Terhadap Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa: Studi Kasus pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi NTT Tahun 2025

Eugenia Hendrini P. Tanan¹, Fransiscus Nicodemus Naiola²

Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang

¹tanan.indry@yahoo.co.id, ²franznaiola06@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to examine the influence of e-procurement, internal control systems, and human resource competence on the quality of goods and services procurement. The population of this research consists of all employees at the Bureau of Goods and Services Procurement, Regional Secretariat of East Nusa Tenggara Province. The research method applied is quantitative, using a survey technique through the distribution of questionnaires. Data were analyzed using validity tests, reliability tests, normality tests, multicollinearity tests, heteroscedasticity tests, multiple linear regression, F-test, t-test, and the coefficient of determination (R^2). The research found that e-procurement has a positive and significant effect on the quality of goods and services procurement, as seen from the t-test analysis ($3.801 > t\text{-table } 2.010$ with a sig. $0.000 < 0.05$). The internal control system has a negative and insignificant effect on the quality of goods and services procurement, as seen from the t-test analysis ($1.797 < t\text{-table } 2.010$ with a sig. $0.079 > 0.05$). Human resource competency has a positive and significant effect on the quality of goods and services procurement, as seen from the t-test analysis ($8.526 > t\text{-table } 2.010$ with a sig. $0.000 < 0.05$). Thus, H_a is accepted and has a significant effect on the quality of goods and services procurement. This research is expected to provide evaluation material for agencies to improve the quality of goods and services procurement.

Keywords: E-Procurement, Internal Control System, Human Resource Competence.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh e-procurement, sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik survei dimana data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengolahan data melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji regresi linear berganda, uji f, uji t, dan koefisien determinasi R^2 . Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa e-procurement berpengaruh positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa, di lihat dari analisis t hitung $3,801 > t$ tabel $2,010$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$. Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa di lihat dari hasil analisis t hitung $1,797 < t$ tabel $2,010$ dengan nilai sig $0,079 > 0,05$. Kompetensi SDM berpengaruh positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa, di lihat dari analisis t hitung $8,526 > t$ tabel $2,010$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dikatakan bahwa H_a diterima atau berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pihak instansi untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa.

Kata Kunci: E-Procurement, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi SDM.

<https://journal.yrpiiku.com/index.php/ceej>

e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

1. Pendahuluan

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu fungsi penting dalam tata kelola keuangan sektor publik yang sangat rawan terhadap praktik korupsi, inefisiensi, dan ketidakefisienan (Rizal & Thamrin, 2024). Pemerintah sebagai organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal kepada stakeholdernya, yakni stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik dan penyediaan barang kebutuhan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan dan peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan transparansi mengingatkan masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik atau kebebasan terhadap informasi. Melaksanakan suatu proses pengadaan yang meliputi pengadaan atas barang maupun jasa dalam lingkup pemerintah, selanjutnya dikenal dengan istilah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Rahayu et al., 2021).

Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dinyatakan bahwa: "Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa" (Akhmad Khambali et al., 2022). Di tingkat nasional, pengadaan barang dan jasa pemerintah mengalami transformasi digital melalui sistem *e-purchasing* berbasis katalog elektronik (*e-catalogue*) dan toko daring yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Anggaran pengadaan barang/jasa setiap tahunnya menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sekitar 40% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Implementasi *e-procurement* di biro pengadaan barang dan jasa berawal dengan mulai dirintisnya LPSE dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi NTT. Seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui 40 persen belanjanya menggunakan metode *e-purchasing*. Kebijakan ini dijumpai sejumlah persoalan yang perlu diperbaiki di NTT, antara lain: Kurangnya pemahaman belanja elektronik, kecilnya jumlah UMKK *Onboard* dan mahal nya harga barang juga jasa. Kurangnya keterampilan pegawai dalam menguasai teknologi dan jaringan serta akses yang tidak merata selama pelaksanaan *e-procurement* juga menjadi permasalahan yang dihadapi. Implementasinya, pemerintah provinsi NTT telah bekerja sama dengan Mbiz Market dan Grab Indonesia. Meski begitu, masih dijumpai bias perencanaan dan pelaksanaan belanja pada 39 perangkat daerah. Evaluasi per 30 November 2023 menunjukkan belanja pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi NTT baru mencapai 39,40 persen atau senilai 418 Milyar Rupiah dengan realisasi belanja Katalog elektronik sebesar 413 Milyar Rupiah dan Toko Daring sebesar 4 Milyar Rupiah. Hal ini juga disebabkan belum meratanya pemahaman akibat tingkat pendidikan rata-rata sumber daya manusia UMKM yang relatif masih rendah. Dari data tahun 2023 yang dipublikasikan di situs resmi (<https://biropbjntt.net/opini.html>) menunjukkan bahwa efektivitas implementasi *e-*

procurement di NTT masih belum optimal. Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan belum sepenuhnya menjamin terwujudnya kualitas pengadaan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Selain teknologi, aspek Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) juga memegang peran sentral dalam menciptakan akuntabilitas dan efisiensi pengadaan. Pengendalian internal yang tergolong baik akan lebih menciptakan manajemen yang lebih matang dalam menghadapi persaingan, percepatan ekonomi dan berbagai tindakan penyimpangan. Penelitian oleh Paulina Manintamahu et al., (2023) menekankan pentingnya regulasi dan implementasi pengendalian internal yang komprehensif dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT. Kelemahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dapat menghambat pencapaian tata kelola yang baik.

Di sisi lain, Kompetensi SDM memegang peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengadaan. Pengelola pengadaan masih menjadi tantangan besar, terutama di daerah tertinggal seperti NTT. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021, pengembangan kompetensi aparatur pengadaan harus dilakukan secara terstruktur melalui pelatihan klasikal maupun non-klasikal. Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menetapkan standar kompetensi bagi pelaku pengadaan, serta mendorong pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi. Selain itu, telah di dikembangkan pula jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa sebagai bentuk pengakuan terhadap profesionalitas SDM pengadaan. Namun, temuan dari penelitian Rumsiana (2024), menunjukkan bahwa masih banyak pelaksana pengadaan yang belum memiliki pemahaman optimal tentang peraturan, sistem *e-procurement*, dan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien dan bebas korupsi, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas pelaksanaan pengadaan di daerah.

Berbagai literatur empiris memperkuat pentingnya ketiga faktor tersebut. Kajian yang dilakukan oleh Primastiwi et al., (2020), Kholby (2022) dan Francesco & Hastuti (2022), menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement*, pengendalian internal, dan kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dan peningkatan efektivitas pengadaan di instansi pemerintah. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara simultan menganalisis ketiga variabel ini dalam konteks daerah tertinggal seperti Provinsi NTT, khususnya pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, yang menjadi lembaga strategis dalam memastikan kualitas belanja publik.

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya mendukung peningkatan tata kelola pengadaan yang lebih berkualitas di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian ini akan mengkaji secara empiris pengaruh implementasi *e-procurement*, sistem pengendalian internal, dan kompetensi SDM terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT tahun 2025. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem, regulasi, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif dan akuntabel.

2. Metode

Jenis Penelitian

Menurut Faradilla & Sofyan (2024), riset kuantitatif mencakup setiap jenis riset yang didasarkan atas data dalam bentuk angka perhitungan persentase, dan perhitungan statistik lainnya yang dikumpulkan melalui pernyataan terstruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengolah data primer dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda yang diperoleh melalui jawaban dari responden atas pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada responden lalu dianalisis dengan menggunakan program SPSS sehingga mendapatkan data serta hasil untuk digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang ada.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih penelitian pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT, Jl. El Tari No. 52, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. 85111 sebagai lokasi penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Primastiwi et al., 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa, khususnya melalui sistem aplikasi E-Katalog, SPSE, dan SIRUP yang berjumlah 57 orang.

Sampel

Sampel adalah merupakan bagian dari populasi (Edwin Adipratama et al., 2021). Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel karena jumlahnya relatif kecil dan semua anggota populasi dianggap memiliki kompetensi atau peran yang relevan dengan topik penelitian.

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Subjek (Subject Data)

Data berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik informan yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.

2. Data Fisik (Physical Data)

Data berupa objek atau bukti fisik yang menunjukkan suatu kejadian, diperoleh melalui observasi dari informan kunci maupun pendukung.

3. Data Dokumenter (Documentary Data)

Data berupa arsip atau dokumen yang memuat informasi tentang peristiwa, waktu, dan pihak yang terlibat, sebagai bukti tertulis untuk penelusuran secara objektif (Arga Surya Wira et al., 2022).

Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber melalui wawancara dan pendapat informan kunci serta pendukung (Desiliani et al., 2025).

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media seperti buku, catatan, dan internet.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis Data

Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan suatu data yang diperoleh dari alat ukur kuesioner yang disebar. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kriteria pengujiannya ialah Ketika r hitung $>$ r tabel pada taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$) maka instrument atau item-tem pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid). Jika nilai signifikansi (P value) $>$ 0,05 maka tidak terjadi hubungan yang signifikan sedangkan jika (P value) $<$ 0,05 maka terjadi hubungan yang signifikan. Hasil Uji Validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
<i>E-Procurement</i> (X1)	X1.1	0,587	0,338	Valid
	X1.2	0,670	0,338	Valid
	X1.3	0,744	0,338	Valid
	X1.4	0,804	0,338	Valid
	X1.5	0,546	0,338	Valid
	X1.6	0,563	0,338	Valid
	X1.7	0,372	0,338	Valid
	X1.8	0,465	0,338	Valid
	X1.9	0,453	0,338	Valid
	X1.10	0,600	0,338	Valid
Sitem Pengendalian Internal (X2)	X2.1	0,584	0,338	Valid
	X2.2	0,628	0,338	Valid
	X2.3	0,863	0,338	Valid
	X2.4	0,793	0,338	Valid
	X2.5	0,675	0,338	Valid
	X2.6	0,789	0,338	Valid
	X2.7	0,501	0,338	Valid
	X2.8	0,753	0,338	Valid
	X2.9	0,584	0,338	Valid
	X2.10	0,739	0,338	Valid
	X2.11	0,455	0,338	Valid
	X2.12	0,535	0,338	Valid
	X2.13	0,516	0,338	Valid
	X2.14	0,409	0,338	Valid
Kompetensi SDM (X3)	X3.1	0,685	0,338	Valid
	X3.2	0,486	0,338	Valid

	X3.3	0,722	0,338	Valid
	X3.4	0,594	0,338	Valid
	X3.5	0,639	0,338	Valid
Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa (Y)	Y1	0,741	0,338	Valid
	Y2	0,496	0,338	Valid
	Y3	0,630	0,338	Valid
	Y4	0,481	0,338	Valid
	Y5	0,477	0,338	Valid
	Y6	0,664	0,338	Valid
	Y7	0,610	0,338	Valid
	Y8	0,478	0,338	Valid
	Y9	0,676	0,338	Valid

Sumber: Output SPSS versi 25, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semua item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dari r tabel. Untuk populasi sebanyak 50 orang yaitu 0,338. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua item pernyataan adalah valid.

Uji Reabilitas

Uji Reabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah dapat diandalkan untuk digunakan lebih lanjut. Hasil uji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha*, Dimana instrument dikatakan *reliable* jika memiliki koefisien *Cronbach alpha* sama dengan 0,06 atau lebih. Data yang tidak reliabel tidak dapat di proses lebih lanjut karena akan menghasilkan Kesimpulan yang bias. Suatu alat ukur yang dinilai reliabel jika pengukuran tersebut menunjukkan hasil-hasil yang konsisten dari waktu ke waktu. Adapun kriteria dari pengujian reabilitas adalah:

- Jika nilai *Cronbach alpha* > 0,06 maka instrument dikatakan reliabel atau terpercaya.
- Jika nilai *Cronbach alpha* < 0,06 maka instrument dikatakan tidak reliabel. Hasil Uji Reabilitas data dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Nilai	Keterangan
<i>E-Procurement</i> (X1)	0,784	0,06	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X2)	0,883	0,06	Reliabel
Kompetensi SDM (X3)	0,606	0,06	Reliabel
Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa (X4)	0,742	0,06	Reliabel

Sumber: Output SPSS versi 25, 2025

Berdasarkan tabel 2 Hasil uji reabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien alpha di atas 0,06 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item-item pengukur variabel dari kuesioner adalah *reliable* yang berarti kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah data yang digunakan untuk melakukan pengujian data observasi apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi atau probabilitas > 0,05 maka H0 diterima atau data berdistribusi normal
- Jika nilai signifikansi atau probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak atau tidak berdistribusi normal

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.95966777
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.051
	Negative	-.096
Test Statistic		.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS versi 25, 2025

Berdasarkan hasil uji diatas, uji *Kolmogorov Smirnov* diperoleh nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0,200 > 0,05 sehingga data dalam penelitian ini dikatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel dependen dan independent. Cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*)

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a										
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	5.454	1.543		3.535	.001						
	E-Procurement (X1)	.196	.051	.256	3.801	.000	.810	.489	.171	.445	2.245	
	Sistem Pengendalian Internal (X2)	.063	.035	.122	1.797	.079	.764	.256	.081	.440	2.272	
	Kompetensi SDM (X3)	1.020	.120	.653	8.526	.000	.929	.783	.383	.344	2.907	

a. Dependent Variable: Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

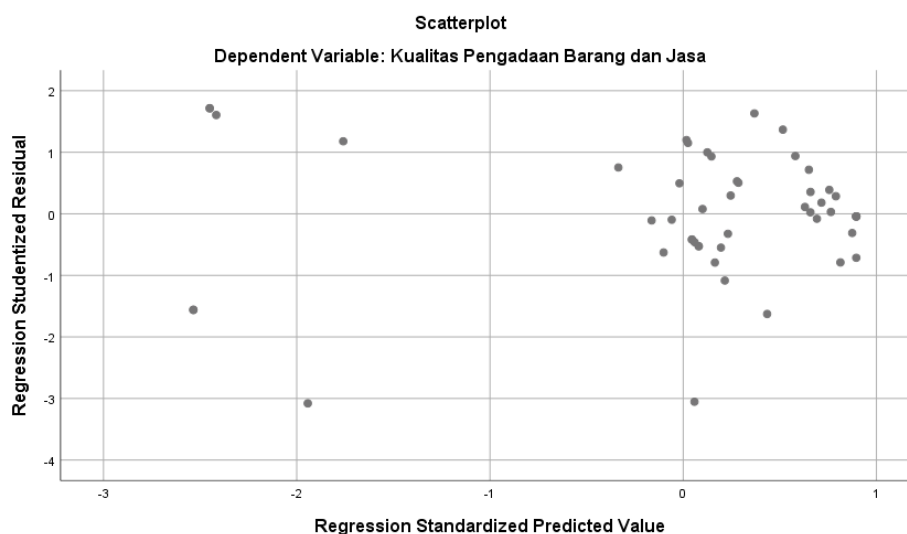
Sumber: Output SPSS versi 25, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian $VIF > 10$ dan nilai *tolerance* $< 0,10$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang di gunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonearitas atau lulus multikolonearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas dilakukan pada model regresi untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini menggunakan uji *scatterplot* dengan melihat ada tidaknya pola tertentu antara ZPRED dan residualnya SRESID dalam grafik tersebut. Berdasarkan pola penyebaran titik: jika titik-titik tersebar secara acak, di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y (misalnya tidak mengerucut dan melebar) maka tidak ada indikasi heterokedastisitas, sehingga model memenuhi asumsi homoskedastisitas. Dan jika terdapat pola tertentu (misalnya berbentuk kipas atau melengkung) maka ada indikasi heterokastisitas.

Berikut adalah hasil dari Uji *Scatterplot*:



Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: Output SPSS versi 25, 2025

Berdasarkan grafik *scatterplot* di atas, titik-titik tampaknya tersebar secara acak disekitar sumbu nol tanpa pola yang jelas. Ini menunjukkan varian residual relative konstan, yang berarti tidak ada indikasi kuat adanya heterokedastisitas. Sehingga dapat disimpulkan model regresi kemungkinan besar tidak mengalami masalah heterokedastisitas sehingga asumsi klasik regresi terpenuhi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independent terhadap satu variabel dependen. Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda dinyatakan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.454	1.543		3.535	.001					
	E-Procurement (X1)	.196	.051	.256	3.801	.000	.810	.489	.171	.445	2.245
	Sistem Pengendalian Internal (X2)	.063	.035	.122	1.797	.079	.764	.256	.081	.440	2.272
	Kompetensi SDM (X3)	1.020	.120	.653	8.526	.000	.929	.783	.383	.344	2.907

a. Dependent Variable: Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber: Output SPSS versi 25, 2025

Berdasarkan tabel 5 Hasil uji analisis regresi linear berganda diperoleh rumusan sebagai berikut:

$$\text{Kualitas pengadaan barang dan jasa} = 5,454 + 0,196X_1 + 0,063X_2 + 1,020 X_3 + e$$

1. Diketahui nilai konstanta 5,545. Nilai tersebut dapat diartikan apabila variabel independent diasumsikan 0, maka kualitas pengadaan barang dan jasa bernilai 5,545.
2. Diketahui nilai koefisien *e-procurement* bernilai positif yaitu 0,196 yang berarti setiap peningkatan 1 unit dalam variabel ini akan meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa sebesar 19,6%.
3. Diketahui nilai koefisien sistem pengendalian internal bernilai positif yaitu 0,063 yang berarti setiap peningkatan 1 unit dalam variabel ini akan meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa sebesar 6,3%.
4. Diketahui nilai koefisien kompetensi SDM bernilai positif yaitu 1,020 yang berarti setiap peningkatan 2 unit dalam variabel ini akan meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa sebesar 102%.

Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel independent terhadap variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Uji F

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df1	df2	
1	.952 ^a	.907	.901	3.05465	.907	149.807	3	46	.000

a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM (X3), E-Procurement (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2)

b. Dependent Variable: Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber: Output SPSS versi 25, 2025

Berdasarkan gambar diketahui nilai signifikansi 0,000 dimana nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa *e-procurement*, sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa.

Uji T

Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.454	1.543		3.535	.001					
	E-Procurement (X1)	.196	.051	.256	3.801	.000	.810	.489	.171	.445	2.245
	Sistem Pengendalian Internal (X2)	.063	.035	.122	1.797	.079	.764	.256	.081	.440	2.272
	Kompetensi SDM (X3)	1.020	.120	.653	8.526	.000	.929	.783	.383	.344	2.907

a. Dependent Variable: Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber: Output SPSS versi 25, 2025

Berdasarkan tabel hasil uji hipotesis, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t, diketahui nilai sig sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 dan t hitung 3,801 lebih besar dari t tabel 2,010 sehingga dapat diartikan bahwa *e-procurement* berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa.
2. Berdasarkan hasil uji t, diketahui nilai sig sebesar 0,079 dimana lebih besar dari 0,05 dan t hitung 1,797 lebih kecil dari t tabel 2,010 sehingga dapat diartikan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa.
3. Berdasarkan hasil uji t, diketahui nilai sig sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 dan t hitung 8,526 lebih besar dari t tabel 2,010 sehingga dapat diartikan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi mengukur seberapa besar kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df1	df2	
1	.952 ^a	.907	.901	3.05465	.907	149.807	3	46	.000

a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM (X3), E-Procurement (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2)

b. Dependent Variable: Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Sumber: Output SPSS versi 25, 2025

Berdasarkan tabel menunjukkan nilai koefisien determinasi adalah 0,907 atau 90,7%. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kemampuan variasi variabel independent yaitu *e-procurement*, sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM dapat menjelaskan sebesar 90,7% terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa sedangkan sisanya 9,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan

***E-procurement* Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa**

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan, diketahui t hitung $3,801 > t$ tabel $2,010$ dengan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ sesuai dengan kriteria penerimaan hipotesis: jika Tingkat signifikansi (sig) $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Maka berdasarkan hasil uji menunjukkan H1 diterima yakni *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT. Hal ini menunjukkan semakin optimal penerapan sistem E-Procurement, maka semakin baik pula kualitas proses dan hasil pengadaan yang diperoleh.

Signifikansi pengaruh menunjukkan bahwa *e-procurement* merupakan salah satu faktor dominan yang berkontribusi dalam menciptakan pengadaan yang berkualitas. Sistem ini mampu mengatasi kelemahan metode konvensional yang rawan manipulasi dan keterlambatan. Selain itu, penerapan *e-procurement* sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hasil penelitian mendukung penelitian terdahulu yakni penelitian yang dilakukan oleh Aini et al., (2023) mengemukakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance* pada pegawai Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Negatif Dan Tidak Signifikan Terhadap Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan, diketahui t hitung $1,797 < t$ tabel $2,010$ dengan nilai sig sebesar $0,079 > 0,05$ sesuai dengan kriteria penerimaan hipotesis: jika Tingkat signifikansi (sig) $> 0,05$ maka hipotesis tidak diterima. Maka berdasarkan hasil uji menunjukkan H2 tidak diterima sehingga dapat dikatakan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat diartikan bahwa keberadaan mekanisme pengendalian internal yang ada saat ini belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas proses pengadaan. Bahkan arah hubungan yang negatif mengindikasikan bahwa semakin ketat penerapan sistem pengendalian internal justru dapat menimbulkan hambatan atau memperlambat proses pengadaan, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan.

Dengan demikian, sistem pengendalian internal di Biro pengadaan barang dan jasa Setda Provinsi NTT belum sepenuhnya berjalan efektif sebagai instrumen peningkatan kualitas. Fungsi utamanya lebih cenderung sebagai alat kepatuhan dan pencegahan penyimpangan, bukan sebagai penentu langsung kualitas pengadaan.

Kompetensi SDM Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa

Berdasarkan uji statistik yang dilakukan, diketahui t hitung $8,526 > t$ tabel $2,010$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$ sesuai dengan kriteria penerimaan hipotesis: jika Tingkat signifikansi (sig) $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Maka berdasarkan hasil uji menunjukkan H3 diterima yakni Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT. Hal ini membuktikan bahwa kompetensi SDM sangat mempengaruhi kualitas pengadaan

barang dan jasa. Penelitian ini dapat di artikan apabila kompetensi SDM pada Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Provinsi NTT semakin baik, maka semakin baik pula kualitas pengadaan barang dan jasa yang dihasilkan.

Hasil penelitian mendukung penelitian terdahulu yakni penelitian yang dilakukan oleh Kholby, (2022) mengemukakan Kompetensi Pegawai berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Tangerang Selatan). Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aryati & Pangaribuan, (2019) yang menunjukkan Kompetensi Pegawai Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kementerian Keuangan.

***E-Procurement*, Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi SDM Secara Simultan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa**

Pengujian secara simultan antara ketiga variabel yaitu *e-procurement*, sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa. Hal ini berarti bahwa ketika ketiga variabel tersebut dijalankan secara bersamaan dan saling mendukung, maka kualitas pengadaan yang dihasilkan akan semakin meningkat. *E-Procurement* memberikan kontribusi melalui transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses pengadaan. Dengan pemanfaatan sistem elektronik, proses lelang dapat dipantau secara terbuka, mengurangi potensi kecurangan, serta mempercepat tahapan administrasi. Sistem Pengendalian Internal berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan pengendali agar seluruh kegiatan pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mampu meminimalisasi penyimpangan. Walaupun secara parsial pengaruhnya tidak signifikan, namun dalam kombinasi dengan faktor lain, pengendalian internal tetap memberi peran penting dalam menjamin proses pengadaan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dan kompetensi SDM menentukan keberhasilan implementasi *e-procurement* dan efektivitas sistem pengendalian internal. Pegawai yang memiliki pengetahuan teknis, integritas, dan keterampilan manajerial akan lebih mampu memanfaatkan teknologi, menegakkan prosedur pengendalian, serta memastikan kualitas hasil pengadaan.

Pengaruh simultan yang positif dan signifikan ini menunjukkan bahwa kualitas pengadaan barang dan jasa tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi dari teknologi, tata kelola, dan kapabilitas manusia. Ketiga faktor ini saling melengkapi yakni teknologi memperkuat transparansi, sistem pengendalian menjaga kepatuhan, sementara kompetensi SDM menjadi penggerak utama yang memastikan kedua aspek tersebut berjalan dengan efektif.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian menunjukkan bahwa *E-procurement* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa pada Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Provinsi NTT. Penelitian ini dapat diartikan bahwa apabila *e-procurement* semakin baik, maka semakin meningkat pula kualitas pengadaan. Penerapan sistem elektronik memberikan manfaat berupa efektivitas sistem, efisiensi, aksesibilitas dan kemudahan penggunaan, keamanan dan kehandalan,

dan kepuasan pengguna serta meminimalisasi potensi terjadinya praktik penyimpangan dalam proses pengadaan.

2. Penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa pada Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Provinsi NTT. Hal ini menunjukkan keberadaan sistem pengendalian internal dalam konteks penelitian ini belum memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengadaan. Bahkan, kecenderungan negatif menunjukkan bahwa pengendalian internal yang terlalu administratif dan birokratis dapat memperlambat proses pengadaan. Dengan demikian, sistem pengendalian internal perlu diperkuat agar lebih adaptif, berbasis risiko, dan mendukung tercapainya kualitas pengadaan.
3. Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pengadaan sangat ditentukan oleh motif, watak, bawaan, pengetahuan, keterampilan, dan integritas pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan. Pegawai yang kompeten akan mampu mengoperasikan sistem *e-procurement* dengan baik, menerapkan pengendalian internal secara efektif, serta menjaga kualitas hasil pengadaan.
4. Penelitian menunjukkan bahwa *E-Procurement*, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT. Implementasi *e-procurement* terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengadaan karena mampu menciptakan efektivitas sistem, efisiensi, aksesibilitas dan kemudahan penggunaan, keamanan dan kehandalan, dan kepuasan pengguna dalam setiap tahapan proses. Demikian pula kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan, yang menegaskan pentingnya motif, watak, bawaan, pengetahuan, keterampilan serta integritas pegawai dalam menjamin efektivitas pengadaan. Sebaliknya, sistem pengendalian internal secara individu menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas pengadaan. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengendalian internal yang ada masih bersifat administratif dan belum berjalan efektif untuk mendukung peningkatan kualitas. Bahkan jika tidak dikelola secara efektif dan efisien, pengendalian internal dapat menimbulkan hambatan yang justru memperlambat proses pengadaan.

5. Daftar Pustaka

- Aini, R., Sihombing, M. & Ridho, H. (2023). "Pengaruh Penerapan *Electronic Procurement* dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara", **PERSPEKTIF**, Vol. 12 No. 2, pp. 628–642.
- Akhmad Khambali, Mochamad Nasir, Roro Vita, & Fahmi Hammam. (2022). "Implementasi *Internal Control* Dalam Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Pembangunan Gedung BAPEDA Kabupaten Pekalongan)", **EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi**, Vol. 1 No. 2, pp. 326–343.
- Arga Surya Wira, Dwi Urip Wardoyo, M. Luthfi Islahuddin, Rahmania Gita Safitri, & Syifa Nabbilah Putri. (2022). "Pengaruh *Sustainability Report* Terhadap Nilai

- Perusahaan (Studi Perusahaan Non Keuangan dari tahun 2018-2020) Proxy : PBV (Price to Book Value)*”, **Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi**, Vol. 2 No. 2, pp. 161–166.
- Aryati, T. & Pangaribuan, L. (2019). “Analisis Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pengadaan Barang Dan Jasa Kementerian Keuangan”, **Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti**, Vol. 4 No. 1, pp. 19–24.
- Astuti, E. & Prabowo, T.J.W. (2023). “Pengaruh Implementasi E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa”, **Diponegoro Journal Of Accounting**, Vol. 12 No. 2, pp. 1–12.
- Biro PBJ Setda Provinsi NTT”. (2023), *Geliat E-Purchasing Di NTT*, URL: <https://biropbjntt.net/>.
- Desiliani, Y., Mansyuri, M.I. & Ramadhan, R. (2025). “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas Dikpora Kab. Dompu”, **Economics and Digital Business Review**, Vol. 6 No. 2, pp. 1049–1062.
- Dewata, E., Farah, E.H., Jauhari, H. & Sari, Y. (2022). “Good Governance and Internal Control on the Prevention of Fraud in the Procurement of Goods and Services for Government Agencies”, **Advances In Sosial Science, Education And Humanities Research**, Vol. 641, Palembang, Indonesia, pp. 150–154.
- Dr. W. Riawan Tjandra,. (2022), *Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Kencana.
- Edwin Adipratama, Ferdinand, F., & Fitria Husnatarina. (2021). “Kinerja pegawai pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah”, **Journal of Environment and Management**, Vol. 2 No. 1, pp. 35–43.
- Faradilla, H. & Sofyan, E. (2024a). “Pengaruh Penerapan E-Procurement, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat”, **Jurnal Nuansa Karya Akuntansi**, Vol. 2 No. 2, pp. 234–246.
- Faradilla, H. & Sofyan, E. (2024b). “Pengaruh Penerapan E-Procurement, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat”, **Jurnal Nuansa Karya Akuntansi**, Vol. 2 No. 2, pp. 234–246.
- Fauzan, A. (2023). “Pengaruh Kompetensi, Komitmen, dan Motivasi Kerja Terhadap Implementasi E-Procurement Pada Kinerja Pegawai Pengadaan Barang/dan Jasa Kabupaten Pemalang”, **Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)**, Vol. 25 No. 2, pp. 32–48.
- Francesco, I.M. & Hastuti, H. (2022). “Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei pada Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi)”, **Indonesian Accounting Research Journal**, Vol. 2 No. 3, pp. 237–243.
- Habibi, M.M. & Untari, S. (2018). “Efektivitas Pelaksanaan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa”, **Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**, Vol. 3 No. 2, pp. 159–168.
- Hashim, N.L., Yusof, N., Hussain, A. & Ibrahim, M. (2022). “User Experience Dimensions for E-procurement”, **Journal of Information and Communication Technology**, Vol. 21 No. 4, pp. 465–494.
- Ihsan Fairuzsyifa, A. & Sulisty Nugroho, Y. (2024). “Analisis Regresi Linier Berganda Pengaruh Minat Calon Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta

- Menggunakan Python*”, **Jurnal Informatika Polinema**, Vol. 10 No. 2, pp. 265–272.
- Iwan Irwansyah, I.I., Zahran, W.S. & Lase, R. (2022). “Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement) Di Kelurahan Cakung Barat”, **MANABIS: Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Vol. 1 No. 3, pp. 250–258.
- Kenangah, R.H., Maria, M. & Mubarak, M.H. (2022). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Kota Palembang”, **Jurnal Riset Terapan Akuntansi**, Vol. 6 No. 2, pp. 297–304.
- Khairunnah, I. & Nadirsyah, N. (2022). “Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Di Provinsi Aceh. **JIMEKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi**, Vol. 7 No. 4, pp. 578–594.
- Kholby, A.S. (2022). “Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tangerang Selatan)”. **Indonesian Accounting Research Journal**, Vol. 3 No. 1, pp. 70-83.
- Ligar Hardika, A., Nababan, D., Noor Bagja, H., Lizwaril, R. & Abdul Halim Rachmat, R. (2024). “Internal Factors in Improving the Procurement Process of Goods and Services to Prevent Fraud”, **International Journal of Management and Economics Invention**, Vol. 10 No. 10, pp. 3634–3639.
- Mendrofa, D., Gea, J.B.I.J., Bate’e, M.M. & Zebua, S. (2024). “Pengaruh E-Procurement Terhadap Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Pada UKPBJ SETDA Kota Gunungsitoli)”, **Visi Sosial Humaniora**, Vol. 5 No. 1, pp. 121–131.
- Mu’ah, M., Masram, M., Amalia, W., Sayyid, M. & Mas’adah, M. (2024). “Pengaruh Implementasi E-Procurement Terhadap Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Mewujudkan Good Governance”, **Riset & Jurnal Akuntansi**, Vol. 8 No. 2, pp. 1810–1822.
- Otti Illham Khair. (2023). **Kebijakan Dan Sanksi Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, CV. Adanu Abimata.
- Pangaribuan, J. (2022). “Penerapan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Untuk Kemudahan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa”, **Jurnal Ilmiah Indonesia**, Vol. 7 No. 2, pp. 2624–2633.
- Paulina Manintamahu, M., Helan, Y.G.T. & Yohanes, S. (2023). “Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur”, **Jurnal Sosial Dan Sains**, Vol. 3 No. 6, pp. 594–608.
- “Peraturan Lembaga Nomor 14 Tahun 2018”.
- “Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018”.
- “PP 60 Tahun 2008”.
- Primastiwi, A., Wardani, D.K. & Hanisah, H. (2020a). “Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa Di Sektor Publik”, **Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora**, Vol. 6 No. 1, pp. 30–36.
- Primastiwi, A., Wardani, D.K. & Hanisah, H. (2020b). “Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap

- Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa Di Sektor Publik*, **Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora**, Vol. 6 No. 1, pp. 30–36.
- Putri, U.A., Hafidhah, H. & Firmansyah, I.D. (2021). “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Opd Kabupaten Sumenep”, **Journal of Accounting and Financial Issue (JAFIS)**, Vol. 1 No. 1, pp. 11–19.
- Rahayu, N.K.D., Endiana, I.D.M. & Arizona, I.P.E. (2021). “Peran E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa Dengan Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Bali)”, **JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)**, Vol. 1 No. 6, pp. 1864–1871.
- Rizal, R. & Thamrin, D. (2024). “Penerapan Prinsip GG Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Sektor Pengadaan Barang Dan Jasa”, **Jurnal Kajian Ilmiah**, Vol. 24 No. 2, pp. 115–124.
- Rumsiana, E.Y.A. (2024). “Analisis Implementasi E-Procurement Terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Di Pemerintah Daerah”, **Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan**, Vol. 10 No. 17, pp. 349–357.
- Syafitri, S.S. & Syafdinal, S. (2023a). “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa”, **Riset & Jurnal Akuntansi**, Vol. 7 No. 1, pp. 866–878.
- Syafitri, S.S. & Syafdinal, S. (2023b). “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa”, **Riset & Jurnal Akuntansi**, Vol. 7 No. 1, pp. 866–878.
- Tsani, F.F. & Yanti, H.B. (2022). “Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara”, **Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)**, Vol. 2 No. 9, pp. 773–784.
- Wardani, D.K., Chaerunisak, U.H., Langu, H.R.L.K.R. & Surjo, M.Z. (2025). “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Provinsi Yogyakarta”, **Proceedings of the 1st International Conference on Social Environment Diversity (ICOSEND 2024)**, Vol. 905, Atlantis Press SARL, Paris, pp. 144–156.
- Wardhani, I.I., Pratami, A. & Pratama, I. (2021). “E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara”, **Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi**, Vol. 7 No. 2, pp. 126–139.